

KEBIJAKAN DAN REGULASI HUKUM UNTUK MENGATASI TANTANGAN PANGAN DI INDONESIA AGAR TERPENUHINYA KEBUTUHAN NUSANTARA

Yuliana Dewi Tambunan¹⁾ , Ikomatussuniah²⁾

Email: 1111230026@untirta.ac.id¹⁾ , iko@untirta.ac.id²⁾

¹⁾Mahasiswa Ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

²⁾Dosen Ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik diolah maupun tidak diolah yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan pembuatan makanan atau minuman. Setiap negara membutuhkan pangan untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhannya.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagian semua orang dan negara setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Kebijakan ketahanan pangan telah ditetapkan dan harus terus ditingkatkan, terutama dalam krisis harga global yang dapat berpengaruh pada ekonomi domestik. Pembangunan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal harus dilakukan dan diperluas.

Ketahanan pangan berperan sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Indonesia juga sebagai negara agraris dengan populasi yang paling besar, memiliki tantangan tersendiri dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan untuk mengatasi tantangan tersebut memerlukan kebijakan dan regulasi hukum untuk menjadi kerangka kerja yang memadai dalam mengelola produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan.

Terkait dengan berbagai aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta hal-hal lainnya, kemiskinan menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi finansial yang terbatas pada keluarga yang sangat tidak mampu berdampak negatif pada tingkat gizi dan kualitas makanan yang rendah, serta menyebabkan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Secara umum, orang-orang yang hidup dalam kondisi

kekurangan mengalami keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka dan memiliki keterampilan usaha yang terbatas. Mereka juga memiliki akses terbatas ke kesempatan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tertinggal dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih besar. Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara yang lebih terarah. Upaya ini termasuk mengurangi beban pengeluaran bagi kelompok miskin dan mendorong peningkatan pendapatan mereka.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan subsidi pangan. Subsidi adalah tindakan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan finansial dalam bentuk penurunan harga, sehingga konsumen dapat membayar harga yang lebih rendah untuk suatu barang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi. Subsidi memiliki tujuan untuk meningkatkan mekanisme pasar dengan menggunakan cara yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu penduduk yang tidak mampu dan kurang mampu, serta memperbaiki kegagalan pasar dengan memastikan efisiensi dalam alokasi barang dan jasa. Terdapat beberapa masalah dalam subsidi saat ini terutama dari segi pengeluaran yaitu tidak cocoknya target program dengan alokasi anggaran. Perkembangan ekonomi memiliki potensi sebagai pendorong utama dalam menciptakan kekayaan yang berpotensi mengatasi kemiskinan dan berbagai permasalahan lainnya.

Pembahasan

Tantangan Pangan di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan dan regulasi hukum terkait ketahanan pangan di Indonesia, penting untuk memahami beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh negara ini.

Salah satu yang menjadi tantangan ketahanan pangan di Indonesia adalah limbah pangan atau biasa disebut *food waste* yang diartikan sebagai pemborosan pangan yang dapat membuat suatu negara dapat kehilangan stok cadangan makanan di masa yang akan datang. Pemborosan pangan merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Menurut laporan World Resources Institute, Indonesia menghasilkan sekitar 23 juta ton pemborosan pangan per tahun, dengan sekitar dua pertiganya berasal dari rumah tangga. Masalah ini diperparah dengan infrastruktur yang tidak memadai untuk penyimpanan dan distribusi makanan, serta kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang masalah ini. Mengurangi pemborosan pangan akan meningkatkan stok cadangan pangan dan fasilitas penanganan pascapanen produk

musiman, mempertahankan kualitas nutrisi, menstabilkan pasokan pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan.

Yang kedua ada dari faktor iklim, perubahan iklim yang ekstrim dapat mempengaruhi ketahanan pangan. pola cuaca yang tidak stabil mengakibatkan gagal panen dan kerugian bagi petani, sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Selain itu bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga dapat mengganggu produksi pangan.

Peran Kebijakan dan Regulasi Hukum

Untuk mengatasi tantangan pangan di Indonesia memerlukan peran dari kebijakan dan regulasi hukum. Berikut beberapa kebijakan dan regulasi hukum yang telah ditetapkan di Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan:

1. Undang-undang Ketahanan Pangan

Menurut undang-undang Ketahanan pangan No. 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menurut pasal 6, perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah Kedaulatan Pangan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan pangan. Undang-undang dan pasal ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perencanaan dalam mengelola produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan.

2. Kebijakan Subsidi Pangan

Implementasi kebijakan subsidi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas para petani dan sebagai bukti nyata dari dedikasi pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan. Pemerintah melaksanakan kebijakan yang komprehensif dalam sektor pangan, yang meliputi seluruh tahapan dari produksi hingga distribusi. Pemerintah mendorong produksi tanaman pangan di sektor hulu dengan memberikan subsidi pada input produksi pangan. Subsidi ini diberikan melalui mekanisme yang mengarahkan bantuan tersebut kepada produsen input produksi. Dalam upaya produksi, pemerintah juga menerapkan kebijakan bantuan keuangan dan program pelatihan dalam metode bertani. Pada bagian akhir rantai pasokan, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengontrol harga jual komoditas tanaman pangan. Banyak kebijakan dalam peraturan pemerintah sering tidak mencapai tujuan yang

diinginkan karena pemahaman tentang objek yang dituju masih kurang akurat. Meningkatkan daya saing komoditas pangan suatu negara masih bisa dilakukan dengan kebijakan subsidi.

Upaya penting pemerintah yang masih terus dilakukan adalah membangun sektor pangan guna mencukupi kebutuhan pangan, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi masalah gizi buruk, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal yang paling berpengaruh terhadap kebijakan subsidi adalah situasi ekonomi, diikuti oleh situasi politik, sosial, dan teknologi. Sementara itu, tujuan utama dari subsidi pangan adalah untuk memastikan ketersediaan pangan serta meningkatkan produksi pangan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Pilihan utama dalam hal pola distribusi dan sistem distribusi pangan adalah menggunakan pola subsidi tidak langsung, dengan produsen yang bertanggung jawab atas distribusi.

Rencana subsidi yang dikembangkan di Indonesia tidak secara eksklusif ditujukan untuk penduduk golongan rendah, termasuk subsidi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas mereka, skema subsidi yang bertujuan untuk membangun modal sosial, dan akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara dalam jangka panjang. Di masa mendatang, serta menjanjikan kepastian. Secara rutin, pemberian bantuan diberikan kepada penduduk yang hidup dalam kondisi kekurangan yang sangat ekstrem. Kegagalan penerapan subsidi di Indonesia untuk mengatasi dampak kegagalan pasar belum memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan. Pemerintah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja berbagai sektor, terutama subsektor tanaman pangan, dengan terus meningkatkan subsidi pangan. Kebijakan ini bertujuan didasarkan pada konsep bahwa pangan memainkan peran vital dalam meningkatkan produktivitas. Subsidi dengan harga pangan yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan pangan yang lebih banyak. Selain itu, subsidi pangan juga diberikan untuk menghadapi lonjakan harga global dan penurunan kadar pangan. Sebagian orang juga mengkritik kebijakan subsidi pangan karena dianggap tidak efisien dalam hal biaya, tidak berhasil mencapai target petani, tidak disalurkan tepat waktu dan harga yang tepat, bahkan bisa mendorong penggunaan pangan yang berlebihan.

Mengacu pada peran hukum dalam mencapai kesejahteraan negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi. Menyangkut kebijakan subsidi pangan, terdapat dua tantangan signifikan yang terkait dengan kebijakan subsidi di sektor pangan. Pertama, secara keseluruhan, ketika menghadapi tantangan ketergantungan pada impor komoditas pangan

yang signifikan, harapannya adalah bahwa subsidi akan dapat mengurangi beban biaya dengan meningkatkan kapasitas dan perlindungan. Diharapkan bahwa pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani saat menanam. Selanjutnya, dalam hal meningkatkan kapasitas dan melindungi petani. Harapan subsidi adalah untuk mengurangi beban biaya. Walaupun persentase komponen subsidi dalam struktur usaha relatif kecil.

Dampak Subsidi Pangan

Keberlanjutan pangan adalah salah satu target global, sehingga setiap negara mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Ketahanan pangan bisa dilihat dari jumlah produksi bahan pangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah Indonesia saat ini masih memilih kebijakan subsidi. Dengan memberikan bantuan keuangan kepada petani dalam bentuk subsidi pupuk, tujuannya adalah untuk mengurangi beban biaya produksi makanan. Dengan begitu, para petani akan termotivasi untuk selalu melanjutkan usaha mereka .

Memiliki produksi yang mencukupi dan berkelanjutan akan berdampak pada penurunan harga pangan bagi konsumen karena penawarannya meningkat sesuai dengan hukum penawaran. Harga bahan pangan yang terjangkau akan menjadi faktor penentu untuk mencapai kondisi ketahanan pangan di suatu negara. Meskipun begitu, keberhasilan mencapai ketahanan pangan untuk warga negara perlu sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan penghasil bahan pangan utama. Subsidi pemerintah, baik itu subsidi energi maupun non energi, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga komoditas pangan, seperti harga gabah di tingkat petani, dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat petani. Sedangkan, bantuan energi dalam bentuk subsidi bahan bakar dapat mempengaruhi kemampuan keluarga dalam membeli barang dan jasa dengan harga terjangkau. Ketika harga bahan bakar dan listrik turun, pertanyaan muncul mengenai implikasinya terhadap distribusi pendapatan.

Selain dalam sektor tertentu, penduduk desa ini juga memiliki area yang cukup luas untuk halaman rumah mereka. Masyarakat desa ini sering menggunakan area tersebut untuk menanam tanaman pangan yang bermanfaat. Kaum yang mengutamakan kesehatan telah mulai mengubah cara hidup mereka demi menjalani pola hidup yang lebih sehat, salah satunya dengan beralih ke konsumsi pangan yang memiliki manfaat kesehatan.

Pangan yang memiliki manfaat kesehatan adalah jenis makanan atau bahan makanan yang memberikan nutrisi yang penting bagi tubuh untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Lebih dari itu, makanan fungsional mengandung zat-zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan atau memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap tubuh, sambil tetap memiliki cita rasa dan tekstur yang nikmat untuk dinikmati. Pangan fungsional merupakan jenis makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami dan bukan berupa kapsul, pil, atau tepung. Pangan yang memiliki khasiat kesehatan harus dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari dan dapat memberikan manfaat tertentu saat dicerna, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit tertentu, mempercepat pemulihan dari penyakit tertentu, mengontrol kondisi fisik dan mental, serta menghambat proses penuaan. Pangan fungsional memerlukan kriteria yang harus terpenuhi.

Persyaratan pangan fungsional meliputi menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan keamanan, serta persyaratan lain yang ditentukan. Selain itu, pangan fungsional harus memiliki manfaat bagi kesehatan yang dievaluasi berdasarkan komponen pangan fungsional, serta disajikan dan dikonsumsi seperti makanan atau minuman biasa. Pangan fungsional juga harus memiliki karakteristik sensorik yang dapat diterima oleh konsumen, seperti tampilan, warna, tekstur atau konsistensi, dan cita rasa.

Tidak seperti tambahan yang umumnya diminum dalam bentuk pil, makanan fungsional dikemas dalam bentuk makanan atau minuman yang tetap memperhatikan rasa, tekstur, warna, dan faktor sensorik lainnya, sehingga tetap menarik dan lezat untuk dikonsumsi. Secara mendasar, mengonsumsi makanan tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar kesehatan dan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetap terjaga.

Terdapat potensi ketimpangan yang mungkin timbul jika orang-orang dengan kelas pendapatan menengah dan atas lebih banyak mengonsumsi dengan dominan. Subsidi energi memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara langsung, subsidi energi mempengaruhi kegiatan memasak di rumah, penggunaan lampu, dan transportasi pribadi. Sementara itu, dampak tidak langsungnya dapat dirasakan melalui peningkatan faktor produksi dan kenaikan harga barang konsumen.

Subsidi Pangan Terhadap Ekonomi

Dampak kemiskinan terlihat pada tingkat, kedalaman, dan keparahannya, menunjukkan bahwa dalam waktu singkat maupun lama, penurunan tingkat kemiskinan di

pedesaan cenderung lebih signifikan daripada penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi pangan memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan distribusi pendapatan terutama untuk rumah tangga di pedesaan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, disarankan untuk melakukan perbaikan pada struktur pasar di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi secara makro dan mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah pedesaan dan perkotaan, diperlukan berbagai kebijakan fiskal yang berbeda guna meningkatkan penerimaan tenaga kerja. Pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pengeluaran untuk mendanai pengembangan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur serta pemberian layanan kepada masyarakat secara umum. Pemerintah perlu melakukan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar dalam penggunaan sumberdaya.

Adanya barang publik, ketidaksempurnaan pasar, serta eksternalitas dari kegiatan ekonomi, termasuk dalam penyediaan makanan untuk kebutuhan nasional, menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan di pasar ini. Ketersediaan pangan adalah hak fundamental setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap orang secara teratur dan layak. Masalah utama yang menjadi fokus kebijakan pangan pemerintah sebuah negara adalah memastikan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki akses yang memadai terhadap makanan setiap saat. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mencapai swasembada pangan, pemerintah memberikan subsidi pangan melalui kebijakan fiskal. Sama seperti di Indonesia, sebuah negara yang memiliki populasi yang besar menghadapi tantangan yang cukup rumit dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Oleh karena itu, kebijakan pangan menjadi masalah utama dalam upaya pembangunan negara tersebut.

Ketahanan pangan terwujud melalui dua faktor utama, yaitu meningkatnya permintaan pangan akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya lapangan kerja sebagai sumber pendapatan yang cukup bagi masyarakat. Kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan mencakup mencapai kestabilan pangan di tingkat nasional. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan melalui kebijakan fiskal seperti memberikan subsidi pangan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Masalah yang rumit timbul dalam pemberian subsidi makanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dalam satu aspek, pemerintah diminta untuk secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk pangan dan benih guna mengurangi beban APBN yang akhirnya mencapai keberlanjutan fiskal. Namun, di sisi lain, mengurangi subsidi untuk pangan dan benih akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan benih di dalam negeri. Selain itu, skema subsidi harga yang selama ini diberikan juga belum dikatakan adil karena belum mendukung produsen secara memadai. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mengenai bagaimana kebijakan fiskal subsidi pangan berdampak terhadap beberapa indikator makroekonomi pada periode waktu yang singkat maupun yang lebih lama. Subsidi pangan, terutama subsidi beras, yang diberikan kepada masyarakat untuk konsumsi mereka, mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja pada sektor terkait langsung, seperti produksi dan distribusi padi dan beras.

Meskipun peningkatan jumlah tenaga kerja ini lebih signifikan dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Perubahan nilai dampak yang baik di daerah pedesaan terjadi karena perbedaan struktur pasar yang mengakibatkan transmisi harga juga berbeda. Dalam jangka pendek, pasar lebih kaku daripada jangka panjang. Jika kita membandingkan efeknya terhadap daerah pedesaan dan perkotaan, dapat dipahami bahwa dampak penyerapan tenaga kerja di perkotaan sebenarnya lebih signifikan. Dalam arti yang sama, subsidi pangan memiliki efek yang lebih signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja di sektor pangan dan industri pangan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Faktanya menunjukkan bahwa di perkotaan, subsidi pangan memberikan kesempatan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah. Namun, dalam jangka pendek, hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan yang mereka miliki untuk membeli beras murah, terutama bagi rumah tangga yang bukan termasuk golongan miskin pekerja atau golongan miskin pangan yang lebih tinggi. Di daerah pedesaan, biasanya tidak mudah untuk mengakses berbagai layanan seperti di kota. Selain itu, budget yang dialokasikan untuk rumah tangga di pedesaan cenderung tetap karena mereka biasanya mengkonsumsi beras yang mereka produksi sendiri. Hal ini juga dipengaruhi oleh pasar yang lebih kaku dalam mentransmisikan harga beras ke rumah tangga di pedesaan.

Pendapatan rumah tangga pedesaan memiliki tingkat elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga perkotaan. Lalu, efek yang dialami oleh rumah tangga yang bukan miskin di wilayah perkotaan maupun pedesaan karena kebijakan subsidi pangan ini

memiliki dampak yang hampir serupa dengan dampak yang dirasakan oleh rumah tangga miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, yang membedakan adalah bahwa dampaknya cenderung lebih kecil pada rumah tangga miskin daripada pada rumah tangga nonmiskin. Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pangan, dampaknya bisa dirasakan oleh semua rumah tangga yang tinggal di pedesaan yang tergolong miskin.

Pada kelompok keluarga miskin di kota, sebagian besar mengalami peningkatan tingkat kemiskinan, kecuali untuk kelompok keluarga miskin non-pertanian di pedesaan yang berada dalam golongan atas. Ada dugaan bahwa subsidi pangan memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan murah dibandingkan dengan kelompok rumah tangga lainnya. Demikianlah, kebijakan subsidi pangan memiliki efek terbesar dalam mengurangi kemiskinan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama pada keluarga miskin yang tidak bekerja.

Pengelolaan Subsidi Pangan

Permintaan semakin meningkat seiring dengan usaha meningkatkan produksi makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri atau mencapai swasembada pangan. Mereka siap melangkah, memulai perjalanannya dan menjelajahi dunia yang menanti mereka di luar sana. Satu aspek penting dalam perkembangan sebuah negara, terutama di negara yang sedang berkembang, adalah keberlanjutan pasokan pangan. Ketahanan pangan merupakan fokus utama dalam proses pembangunan dan merupakan salah satu alat penting dalam pembangunan ekonomi. Ketersediaan dan kualitas pangan yang mencukupi merupakan acuan penting dalam memastikan semua warga negara memiliki akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sehat, aktif, dan memungkinkan mereka untuk berproduksi secara efektif.

Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, pencapaian ketahanan pangan merupakan hasil dari kondisi ekonomi yang stabil dan mendukung untuk pembangunan. Itulah sebabnya, setiap negara selalu berusaha membangun sistem yang kuat untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri, seperti halnya Indonesia yang memberikan prioritas utama pada pembangunan ketahanan pangan. Sebagai pengelola, pemerintah bertugas untuk memastikan ketersediaan pangan bersubsidi dan menjaga agar harganya tetap terjangkau di pasar. Tidak hanya itu, tanggung jawab pemerintah juga mencakup pengawasan, pemantauan, penilaian, dan

memastikan program subsidi berjalan lancar. Dalam konteks tradisional, isu ketahanan pangan seringkali dibicarakan dalam hubungannya dengan kemampuan negara untuk memproduksi dan menyediakan kebutuhan pangan sendiri.

Produksi pangan yang memadai di dalam negeri adalah kunci untuk mencapai swasembada pangan. Beralih ke kemandirian mengabaikan kebutuhan impor sebagai sumber primer pasokan sementara independensi tidaklah terbatas seperti itu. Kemandirian diartikan sebagai kemampuan suatu negara dan masyarakat untuk secara efektif memproduksi makanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di negaranya. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu menggantungkan diri semata-mata pada produksi pangan dalam negeri.

Penting bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian dan bahkan meningkatkan ekspor dalam produksi komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kemandirian dan daya saing dalam hal ketahanan pangan dapat dicapai jika negara mampu menghasilkan jumlah pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berlanjut secara berkelanjutan, memiliki kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Belum bisa disebut sebagai suatu sukses jika peningkatan produksi pangan diikuti oleh peningkatan harga pangan yang berakibat kepada beban yang ditanggung oleh konsumen, serta memicu inflasi dan ekonomi yang mahal. Menghadapi masa depan, tantangan yang perlu diatasi agar produksi pangan Indonesia dapat bersaing adalah mengurangi biaya produksi dan meningkatkan mutu produknya.

Kesimpulan

Menurut peraturan Ketahanan pangan nomor 18 Pada tahun 2012, terjadi situasi di mana kebutuhan pangan tercukupi baik untuk negara maupun individu. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan pangan yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Pangan tersebut juga aman, bervariasi, bergizi, merata, dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat tanpa melanggar agama, keyakinan, dan budaya mereka. Tujuan dari situasi ini adalah agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan subsidi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh petani dan sebagai bukti konkret dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah melakukan implementasi kebijakan yang menyeluruh dalam bidang pangan, mencakup semua proses mulai dari produksi hingga distribusi. Karena itu, perlunya memastikan bahwa setiap individu memperoleh makanan yang cukup dan memadai secara rutin. Perhatian utama dari kebijakan pangan pemerintah sebuah negara adalah untuk

menjamin bahwa seluruh warga di wilayah tersebut dapat memperoleh makanan dengan cukup setiap waktu.

Daftar Pustaka

- Asriyana Suryana, E., Wiryadi Effendi, M., & Luna, P. (2023). Challenges and Strategies for Food Waste Reduction Policy in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 41(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v41n1.2023.1-14>
- Bulog. (n.d.). *Ketahanan Pangan*. <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>
- Jamil, A. (2022). Inclusiveness of Policies and The Role of Actors in Subsidied Fertilizer Management to Achieve Food Security. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 161–172. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v20n2.2022.161-172>
- Juwana, H., & Doktor, K. (2018). Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37–65.
- MR Taufikurohman, R Oktaviani, M Tambunan, B. H. (2011). *Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan*. 2, 171–182. <https://www.unida.ac.id/pmbsimpan/data/index.php/JSH/article/view/101/106>
- Nanda Triandita, Khori Suci Maifianti, Maya Indra Rasyid, Hilka Yuliani, L. A. (2020). Pengembangan Produk Pangan Fungsional Dalam Meningkatkan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suak Pandan Aceh Barat. *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 457–464. <https://www.neliti.com/id/publications/506764/pengembangan-produk-pangan-fungsional-dalam-meningkatkan-kesehatan-dan-kesejahteraan>
- Permata Bunda, C. A., Helbawanti, O., & Faqihuddin, F. (2021). Dampak Subsidi Terhadap Harga Gabah dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agristan*, 3(1), 71–83. <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.2974>
- Sudewo, P. A. (2021). Tantangan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing, Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Sebuah Studi Analisis. *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i2.79>
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (2016). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi*. 1–6.

